

Pengaruh Kepemilikan Sumber Daya Wisata terhadap Kinerja Desa Membangun di Provinsi Kalimantan Timur

Rian Hilmawan¹, Yesi Aprianti², Nurfiza Widiya³

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

³Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

Corresponding author: yesi.aprianti@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Dengan menggunakan data cross-section pada 80 kecamatan di Kalimantan Timur, data kemudian dianalisis dengan teknik regresi Ordinary Least Square, baik secara langsung maupun menggunakan instrumen variabel kontrol. Secara empiris, terdapat bukti adanya pengaruh positif dan signifikan dari kepemilikan sumber daya wisata terhadap indeks desa membangun pada tahun 2021. Pengaruh ini konsisten dengan mengendalikan beberapa variabel kontrol, termasuk dalam hal ini tingkat pendidikan kepala desa, tingkat pendidikan sekretaris desa dan jumlah BUMDes. Selanjutnya, tingkat pendidikan kepala desa dan sekretaris desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap indeks desa membangun pada tingkat kecamatan. Jumlah BUMDes juga berpengaruh positif namun tidak signifikan dalam studi ini. Hasil pengujian tahap akhir, dengan menggunakan variabel moderasi, di mana baik menggunakan tingkat pendidikan kepala desa dan sekretaris desa, maupun jumlah BUMDes, kesemua variabel ini tidak terbukti secara statistik menjadi variabel yang memoderasi pengaruh kepemilikan sumber daya wisata terhadap indeks desa membangun di tingkat kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi tersebut mengindikasikan pentingnya sumber daya terdapat pembangunan desa.

Abstract

Using cross-section data in 80 sub-districts in East Kalimantan, the data was then analyzed using the Ordinary Least Square regression technique, either directly or using control variable instruments. Empirically, there is evidence of a positive and significant influence of tourism resource ownership on the developing village index in 2021. This influence is consistent with controlling several control variables, including in this case the level of education of the village head, the level of education of the village secretary and the number of BUMDes. Furthermore, the level of education of village heads and village secretaries has a positive but not significant effect on the index of developing villages at the sub-district level. The number of BUMDes also had a positive but not significant effect in this study. The results of the final stage of testing, using moderation variables, where both using the education level of village heads and village secretaries, as well as the number of BUMDes, all of these variables are not statistically proven to be variables that moderate the influence of tourism resource ownership on the index of developing villages at the sub-district level in East Kalimantan Province. This condition indicates the importance of resources for village development.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2024 Rian Hilmawan, Yesi Aprianti, Nurfiza Widiya.

Article history

Received 2024-06-09

Accepted 2024-07-17

Published 2024-08-30

Kata kunci

Sumber daya wisata;
Pendidikan Aparatur
Desa;
BUMDes;
Pembangunan Desa.

Keywords

Tourism resources;
Village Apparatus
Education;
BUMDes;
Village Development.

1. Pendahuluan

Pembangunan wilayah perdesaan di Indonesia telah menjadi prioritas utama yang muncul dalam perencanaan jangka menengah (RPJMN 2020 - 2024) dan panjang nasional. Pembangunan desa melalui pengembangan potensi wisata yang dimiliki dapat menjadi daya ungkit percepatan pembangunan perdesaan ke arah desa yang terkategori mandiri. Melalui Kementerian Desa, setiap tahun diterbitkan informasi terkait Indeks Desa Membangun (IDM) yang mengklasifikasikan kategori desa menjadi "Mandiri", "Maju", "Berkembang", "Tertinggal" dan "Sangat Tertinggal". Dasar pengkategorian ini ialah mengacu dari hasil perhitungan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang merangkum dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Secara regional Provinsi Kalimantan Timur telah terpilih sebagai wilayah Ibu Kota Negara (IKN), di sisi lain indeks pembangunan desa di Kaltim belum banyak mengkategorikan desa yang terkategori mandiri. Permasalahan selanjutnya ialah minimnya eksplorasi yang membahas faktor-faktor penentu pembangunan desa di Indonesia jika ditinjau dari dimensi kepemilikan sumber daya wisata (alam dan buatan), serta pengaruh infrastruktur desa, jumlah dan tingkat pendidikan aparatur desa. Sehingga perlu dianalisis secara empiris kaitan sumber daya wisata alam dan buatan dalam mendukung pembangunan desa.

Studi tentang keberadaan desa wisata terhadap pembangunan desa, masih dilakukan pada wilayah tertentu. Studi literatur yang kami lakukan, menemukan titik fokus potensi desa pada sumber daya, aset (infrastruktur) desa, dan peran birokrasi. Wisata desa memerlukan aset fisik untuk mengakomodasi pengembangannya. Dalam studi yang dilakukan Ulfah et.al (2017) di Desa Bumuaaji tentang potensi desa melalui pengembangan agrowisata, menyatakan bahwa proses pembangunan memang tidak dapat dikatakan berjalan optimal. Namun agrowisata telah memberikan manfaat positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Studi pengaruh destinasi wisata terhadap pembangunan desa umumnya didominasi dengan pendekatan kualitatif seperti studi dari Hermawan (2016). Berdasarkan fenomenanya, semakin banyak kepemilikan sumber daya wisata dapat meningkatkan kemungkinan kunjungan dari wisatawan domestik dan mancanegara, dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas pembangunan desa. Hal ini misalnya tercermin dari Gambar yang menunjukkan diagram pencar hubungan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dengan pembangunan desa pada tingkat provinsi yang diukur dari variabel IDM. Hasil mengindikasikan adanya hubungan yang positif volume kunjungan wisatawan dan kualitas pembangunan desa secara positif, berdasarkan garis tren linearnya. Hal ini merupakan fenomena yang ditangkap yang mencerminkan perlunya dilakukan analisis empiris secara kuantitatif dari pengaruh kepemilikan sumber daya wisata yang diukur dari jumlah destinasi wisata terhadap IDM.

Keberadaan desa wisata akan ditunjang dengan manajemen desa wisata yang baik. Peran birokrasi, misalnya pada studi Kusmayadi dan Fauzi dengan lokasi studi di Desa Gubuglakah (Malang, Indonesia) yang memanfaatkan birokrasi dalam peningkatan wisata desa. Dengan pendekatan kualitatif, Kusumayadi dan Fauzi menyatakan bahwa pengembangan wisata desa memerlukan potensi ekologi, sosial dan budaya. Sementara itu Larasati dan Kurrahman (2019) pada lokasi penelitian di kabupaten juga mengungkapkan peran birokrasi diperlukan sebagai "jembatan" pengolahan potensi desa.

Dalam kaitannya dengan BUMDes, secara empiris hanya terdapat beberapa penelitian yang menyinggung tentang dimensi BUMDes, dan sayangnya studi-studi ini bersifat lokal (tingkat kecamatan tertentu). Kajian dampak BUMDesa terhadap peningkatan pendapatan dan pembangunan desa pernah dilakukan pada level kecamatan. Penelitian Wicaksono dkk (2014) dan Sembiring (2017) secara kualitatif pada BUMDesa di level kecamatan, menyimpulkan bahwa dengan adanya pengelolaan keuangan dan hubungan kerjasama yang baik peran BUMDesa dapat diperkuat dengan cara pemerintah kabupaten/kota menetapkan regulasi terkait operasional BUMDesa tersebut. Hal ini dinyatakan dalam penelitian Prawitno (2019), selain itu, BUMDesa juga membutuhkan SDM yang profesional sebagai motor penggerak.

Masih dengan metode penelitian kualitatif, studi Sinarwati dkk (2020) menyimpulkan bahwa BUMDesa merupakan wirausaha sosial dengan tujuan meningkatkan PADesa, pembangunan di

desa dan pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa dapat menjadi alat Kementerian Desa untuk pembangunan desa tertinggal. Adapun Kurniawan dan Firmansyah (2018) menyatakan memiliki BUMDes dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena BUMDesa dapat menjadi solusi eksternal dalam memanfaatkan potensi sumber daya desa. Dampak dari pendirian BUMDesa diharapkan dapat menjadi upaya dalam peningkatan Pembangunan desa. Ini merupakan contoh demokrasi pemerintahan dari desa dan akan kembali lagi ke desa.

Selanjutnya, studi yang berfokus pada desa wisata, misalkan studi Suryaningsih & Nugraha (2018) yang berlokasi di Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang dengan judul "Peran Lembaga Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Wanurejo Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal". Hasil penelitian menemukan bahwa desa wisata memberikan dampak pada variasi pekerjaan dan pengembangan usaha baru disektor penunjang pariwisata sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Desa wisata juga memberikan dampak kepada pembangunan fisik desa dimana terdapat peningkatan pembangunan sarana prasarana Desa dan adanya peran desa mengadakan pelatihan kepada para pelaku wisata. Temuan ini juga didukung oleh hasil kajian serupa dengan tema pengembangan desa wisata dan peningkatan pendapatan masyarakat. Misalnya, oleh Handayani & Harlina (2021) dengan mengambil lokasi di Desa Kemiren Banyuwangi menemukan bahwa semakin banyak wisatawan akan berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan keluarga, oleh sebab itu peningkatan sarana prasarana, dan penyediaan akomodasi akan mendukung hal tersebut. Menurut penelitian Mutya (2020) yang berlokasi di Kabupaten Maros dengan menggunakan alat analisis korelasi menemukan bahwa usia keberadaan pariwisata dan pendapatan pariwisata memiliki pengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan sarana dan prasarana (wahana baru) destinasi. Selanjutnya, penelitian dari Ni Wayan Sutiani (2019) bertujuan untuk mengetahui peranan desa wisata dalam pembangunan Desa Munduk, Kabupaten Buleleng. Fokus kajian adalah membahas tentang desa wisata dan pembangunan desa dengan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan desa wisata dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat desa selain sebagai petani. Pemberian fasilitas pendanaan bagi pengembangan wisata dan masyarakat diberikan kemudahan untuk permodalan dapat mendukung desa wisata di Desa Munduk sehingga dapat meningkatkan pembangunan desa.

Kajian kualitatif terhadap pembangunan desa dengan mengandalkan desa wisata juga dilakukan pada masa pandemi covid-19. Kajian Murodah et al. (2022), Made Bayan Ni Luh et al. (2021) dan Utari & Ati (2022) yang dengan tujuan yang sama yaitu mengetahui dampak pembangunan wisata atas implikasi potensi desa wisata. Desa wisata memiliki dampak pada ekonomi masyarakat. Disisi lain, dampak negatif yang sudah terjadi pada lingkungan sekitar menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan lingkungan. Selanjutnya desa melakukan pengembangan dengan penataan desa yang secara visual terlihat indah sehingga sebagian masyarakat desa berinisiatif untuk membuka usaha di sekitar destinasi. Namun adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada sektor wisata, hal ini menjadi penghambat keberlanjutan wisata, langkah taktis perlu dilakukan pemerintah setempat sehingga desa wisata bisa berkembang dan berjalan dengan efektif dan efisien.

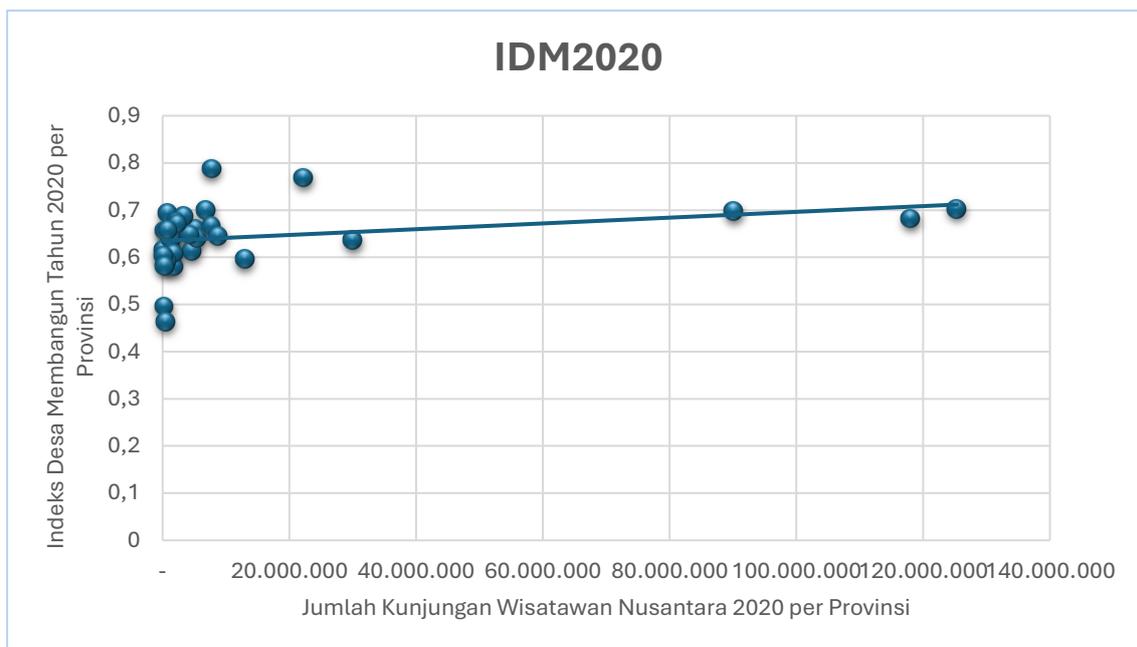
Pengembangan pariwisata memiliki keeratan hubungan dengan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pembangunan desa (Kartika (2016)). Adapun dampak positif dari aspek ekonomi yaitu menambah peningkatan asli desa dan peningkatan pendapatan masyarakat. yakni dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan pendapatan masyarakat dengan adanya peluang pekerjaan, serta meningkatkan pembangunan desa. Selanjutnya pada bidang sosial budaya terdapat dampak positif berupa peningkatan pengetahuan akan sejarah desa, dimana mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan wisata dapat menjadi pemandung untuk wisatawan menggali budaya desa. Secara berkelanjutan, akan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk terus menggali kekayaan budaya, dan adanya upaya menghidupkan kembali pertunjukan seni dan ritual lama desa yang hampir punah, serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan bahasa tradisional (bahasa Jawa). Kajian ini didukung dengan temuan dari Saputra (2021) yang berlokasi di Desa Tanjung Belit, Kabupaten Kampar mengangkat tujuan penelitian mengukur pengaruh kawasan pengembangan Ekowisata terhadap ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menyatakan

bahwa pengembangan kawasan Ekowisata memberikan pengaruh terhadap peningkatan sektor ekonomi masyarakat Desa Tanjung Belit. Peningkatan tersebut direfleksikan dengan adanya pembukaan usaha baru masyarakat baik di bidang kuliner, akomodasi, pemandu wisata dan pada akhirnya terjadi peningkatan PADes berupa retribusi parkir dan parkir.

Dampak desa wisata memiliki pengaruh pada dua sisi yakni positif pada perkembangan ekonomi lokal dan dampak negatif terhadap lingkungan fisik jika masyarakat tidak menjaga kelestarian wisata. Dampak negatif misalnya dapat terjadi pada penurunan kualitas air atau penimbunan sampah sisa wisatawan. Temuan penelitian tersebut juga didukung oleh studi dari Wibowo et al. (2019) yang mengambil lokasi di Desa Sukajaya, Provinsi Lampung. Dengan teknik *purposive sampling* yang kemudian melengkapi data dengan wawancara, disimpulkan bahwa terdapat manfaat fisik, sosial, budaya, dan ekonomi dari perkembangan pariwisata. Secara lebih spesifik terdapat perubahan infrastruktur jalan, perubahan profesi pekerjaan masyarakat, peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan dan peningkatan pendapatan sampai dengan 85%. Namun dampak negatif yang ditimbulkan adalah hilangnya rasa percaya masyarakat Desa Sukajaya terhadap pemerintah dan pengelola wisata dan memudahkan rasa gotong royong antar masyarakat.

Berbagai kajian sebelumnya dilakukan dengan mengerucutkan kesimpulan bahwa peningkatan kapasitas pariwisata desa memberikan dampak pada pembangunan desa dan ekonomi masyarakat. Desa dapat mengembangkan kepemilikan sumberdaya dibidang pariwisata untuk pembangunan desa. Namun hanya terdapat satu studi dengan pendekatan kuantitatif terpublikasi tentang BUMDes di Indonesia, yaitu Arifin dkk. (2020) yang mengkaji implikasi dana desa terhadap pendirian BUMDes dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja desa. Mengambil keuntungan dari data survei di 1.111 desa dan 904 kecamatan (Kelurahan) di Indonesia, Arifin et al. (2020) menggunakan metode *first-difference* dan *difference-in-differences*, dan menemukan bahwa peningkatan jumlah BUMDes kemungkinan dipengaruhi oleh penetrasi dana desa, tetapi ada bukti lemah bahwa kenaikan tersebut berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja pada komunitas masyarakat desa. Studi dengan pendekatan *difference-in-differences* juga diterapkan oleh studi dari Puri dan Khoirunnurofik (2021), namun memfokuskan pada dampak BUMDes terhadap industri mikro, koperasi simpan pinjam dan kios sarana prasarana pertanian. Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya perbedaan kinerja pada desa yang memiliki BUMDes dibandingkan yang tidak memiliki BUMDes.

Dapat kami sintesakan bahwa mayoritas penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis deskriptif maupun kualitatif dalam mengetahui pengaruh wisata terhadap pembangunan desa, sehingga studi ini menggunakan alternatif berbeda yaitu menggunakan teknik kuantitatif dengan memfokuskan pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga memberikan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk (1) untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan sumber daya wisata (jumlah destinasi wisata alam dan buatan) terhadap indeks desa membangun di Provinsi Kalimantan Timur, dengan ruang lingkup diintegrasikan pada tingkat kecamatan. Penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel kontrol yaitu infrastruktur ekonomi (pasar), infrastruktur telekomunikasi, serta jumlah industri mikro sebagai variabel pengendali. (2) menguji secara empiris pengaruh tingkat pendidikan aparatur desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) dan BUMDes terhadap kualitas pembangunan desa dan apakah ketiga variabel tersebut berperan sebagai variabel moderasi terhadap indeks desa membangun.



Gambar 1. Hubungan Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Indeks Desa Membangun Tingkat Provinsi Tahun 2020

Sumber: *Updating Podes 2021*.

Urgensi dari penelitian ini adalah dengan besarnya harapan pemerintah terhadap pembangunan perdesaan, perlu ada kajian empiris yang menguji pengaruh kepemilikan sumber daya wisata di desa dan kaitannya dengan percepatan pembangunan desa. Ini akan menjadi basis formulasi kebijakan pemerintah dalam mendukung strategi pengembangan pariwisata desa sebagai katalis pembangunan desa, dimana secara empiris desa mengenali potensi peningkatan wisatanya. Sehingga pertanyaan penelitian yang akan dikaji adalah: Apakah kepemilikan sumber daya wisata desa (alam/buatan), aset fisik desa, karakteristik birokrasi desa, serta latar belakang pendidikan aparatur desa mempengaruhi kinerja IDM?; Apakah latar belakang pendidikan aparatur desa menjadi pemoderasi pengaruh sumber daya wisata desa terhadap IDM?; dan apakah BUMDes berperan sebagai pemoderasi pengaruh sumber daya wisata desa terhadap kinerja IDM di Provinsi Kalimantan Timur?

2. Metode

2.1. Jenis dan Data Penelitian

Proses manajemen dan pengolahan data seluruhnya dilakukan dengan menggunakan bantuan Ms. Excel dan dianalisis lebih lanjut dengan bantuan program Stata 17. Studi ini menggunakan desain penelitian kuantitatif berbasis analisis regresi dengan jenis data *cross-section* kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik regresi *Ordinary Least Square* (OLS) baik tanpa dan dengan interaksi. Pendekatan regresi relevan untuk menguji secara empiris dan menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh variabel independen utama yaitu kepemilikan sumber daya wisata terhadap IDM sebagai variabel dependen.

Data untuk variabel dependen diambil dari Kementerian Desa melalui <https://idm.kemendes.go.id/>. Data IDM berfokus pada tahun 2021, yang meskipun tersedia pada tingkat desa, karena angka indeksnya adalah konstan pada tingkat desa dalam satu kecamatan yang sama, maka dalam studi ini kami menggunakan data IDM tingkat kecamatan. Data untuk variabel independen diambil dari survei Potensi Desa (*Podes Updating*) tahun 2020 yang disediakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada silastik.bps.go.id. Data ini pada tingkat desa dengan fokus pada desa-desa di Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian diagregasikan ke tingkat kecamatan. Untuk itu maka data desa pada Podes 2020 juga dilakukan metode *collapsing* pada software Stata, ke level kecamatan untuk menyesuaikan dengan data IDM kecamatan sebelumnya.

Adapun variabel independen yang diambil dari survei Podes 2020 yang digunakan meliputi *kode R805a* (keberadaan jumlah menara telepon seluler (*Base Transceiver Station* (BTS)), *kode R805b* (jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler), *kode R901* (jumlah industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) menurut bahan baku utama), *kode R1202* (jumlah unit usaha BUMDes), *kode R1203* (jumlah pasar desa), *kode R1301AK5* (pendidikan tertinggi yang ditamatkan Kepala Desa), *kode R1301BK5* (pendidikan tertinggi yang ditamatkan Sekretaris Desa), dan *kode R1302* (jumlah aparatur pemerintahan baik sekretariat desa maupun pelaksana teknis). Data *sumberdaya_wisata* ialah jumlah kepemilikan sumber daya wisata desa baik alam dan buatan yang diambil dari Podes 2018. Sementara untuk variabel IDM 2021 merupakan indeks komposit yang mengukur dimensi-dimensi pembangunan di desa. Mengacu ke *Manual Book IDM 2021* yang diterbitkan Kementerian Desa, terdapat tiga dimensi yang dijadikan fokus yaitu dimensi ekologi, dimensi ekonomi dan dimensi sosial. Khusus dimensi sosial dipecah ke dalam empat bidang yaitu Sosial-Kesehatan, Sosial-Modal Sosial, Sosial-Pendidikan, dan Sosial-Permukiman.

2.2. Metode Analisis

Analisis regresi OLS digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen utama (kepemilikan sumber daya wisata desa yang diproksi dengan jumlah kepemilikan destinasi wisata alam dan buatan) terhadap kinerja desa membangun yang diukur dengan menggunakan IDM tahun 2021. Dalam bentuk tereduksi, model regresi kami mula-mula dinyatakan ke dalam persamaan berikut ini:

$$Desa\ membangun_{2021_i} = \alpha_i + \beta_1 Sumberdaya_wisata_i + \sum_{i=1}^n \gamma_i X_i + \epsilon_i$$

Dalam persamaan (1), *Desa membangun_{2021_i}* merupakan variabel dependen berupa nilai indeks desa membangun dengan skala 0 - 1 dengan *i* merepresentasikan masing-masing kecamatan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur (tidak termasuk Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang). Parameter β_1 menangkap besarnya pengaruh sumber daya wisata (alam dan buatan) terhadap indeks desa membangun. Parameter γ_i merupakan vektor yang menangkap pengaruh dari masing-masing variabel kontrol di antaranya infrastruktur ekonomi desa, jumlah aparatur pemerintah desa, kegiatan industri mikro dan kecil serta infrastruktur telekomunikasi dasar (jumlah BTS).

Pada model regresi kedua kami memasukkan variabel pendidikan aparatur desa yaitu tingkat pendidikan kepala desa dan sekretaris desa. Karena data digabung ke tingkat kecamatan, maka pengukuran tingkat pendidikan ialah dalam bentuk rasio atau *share* di mana kepala desa atau sekretaris desa yang memiliki pendidikan Diploma ke atas dibagi dengan jumlah kepala desa atau sekretaris desa dalam kecamatan tersebut. Variabel kontrol terakhir yang dimasukkan dalam model adalah kepemilikan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam hal ini Jumlah Unit BUMDes.

Dalam bentuk tereduksi, model regresi kedua ini dinyatakan ke dalam persamaan berikut ini:

Model 1:

$$Desa\ membangun_{2021_i} = \alpha_i + \beta_1 Sumberdaya_wisata_i + \beta_2 Pendidikan_Kades_i + \sum_{i=1}^n \gamma_i X_i + \epsilon_i$$

Model 2:

$$Desa\ membangun_{2021_i} = \alpha_i + \beta_3 Sumberdaya_{wisata_i} + \beta_4 Pendidikan_{Sekdes_i} + \sum_{i=1}^n \gamma_i X_i + \epsilon_i$$

Model 3:

$$Desa\ membangun_{2021_i} = \alpha_i + \beta_5 Sumberdaya_wisata_i + \beta_6 Jumlah_BUMDes_i + \sum_{i=1}^n \gamma_i X_i + \epsilon_i$$

Model 4:

$$Desa\ membangun_{2021_i} = \alpha_i + \beta_7 Sumberdaya_wisata_i + \beta_8 Pendidikan_Kades_i + \beta_9 Pendidikan_Sekdes_i + \beta_{10} Jumlah_BUMDes_i + \sum_{i=1}^n \gamma_i X_i + \epsilon_i$$

Untuk menganalisis apakah variabel tingkat pendidikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta BUMDes menjadi pemoderasi pengaruh sumber daya wisata terhadap kinerja desa membangun, kami menggunakan metode regresi interaksi yang diekspresikan dalam persamaan berikut:

Model 1:

$$Desa\ membangun_i = \theta_i + \delta_1 Sumberdaya_wisata_i + \delta_2 Pendidikan_Kades_i + \delta_3 (Sumberdaya_wisata_i \times Pendidikan_Kades_i) + \sum_{i=1}^n \vartheta_i X_i + \epsilon_i$$

Model 2:

$$Desa\ membangun_i = \theta_i + \delta_4 Sumberdaya_wisata_i + \delta_5 Pendidikan_Sekdes_i + \delta_6 (Sumberdaya_wisata_i \times Pendidikan_Sekdes_i) + \sum_{i=1}^n \vartheta_i X_i + \epsilon_i$$

Model 3:

$$Desa\ membangun_i = \theta_i + \delta_7 Sumberdaya_wisata_i + \delta_8 Pendidikan_Sekdes_i + \delta_9 (Sumberdaya_wisata_i \times Pendidikan_Sekdes_i) + \sum_{i=1}^n \vartheta_i X_i + \epsilon_i$$

Penggunaan variabel-variabel interaksi dalam penelitian ini menggunakan tipe variabel kontinyu, yang sebagaimana dijelaskan oleh Stock & Wason (2020) bahwa teknik interaksi memungkinkan efek dari perubahan variabel X1 untuk bergantung kepada variabel X2, artinya X2 menjadi pemoderasi. Sehingga dalam hal ini prosedur interaksi yang diterangkan dalam persamaan variabel (6) misalnya mengartikan bahwa variabel kepemilikan sumber daya wisata untuk bergantung dengan variabel tingkat pendidikan kepala desa Parameter δ_3 menangkap nilai koefisien pengaruh variabel interaksi antara sumber daya wisata dan pendidikan kepala desa. Arah pengaruh positif dan signifikan mengindikasikan bahwa pengaruh sumber daya wisata terhadap kualitas pembangunan desa diperkuat dengan semakin tingginya tingkat pendidikan kepala desa. Parameter δ_6 merupakan nilai koefisien pengaruh variabel interaksi antara sumber daya wisata dan pendidikan sekretaris desa. Arah pengaruh positif dan signifikan mengindikasikan bahwa pengaruh sumber daya wisata terhadap kualitas pembangunan desa diperkuat dengan semakin tingginya tingkat pendidikan sekretaris desa. Dengan kata lain, baik parameter dan secara parsial memoderasi (memperkuat) pengaruh sumber daya wisata Parameter δ_9 merupakan nilai koefisien yang mengindikasikan pengaruh variabel interaksi sumber daya wisata dan jumlah BUMDes. Arah pengaruh positif dan signifikan mengindikasikan bahwa pengaruh sumber daya wisata terhadap kualitas pembangunan desa diperkuat dengan semakin meningkatnya jumlah BUMDes. Dalam hal ini jumlah BUMDes memoderasi (memperkuat) pengaruh sumber daya wisata ke pembangunan desa.

3. Hasil dan Pembahasan

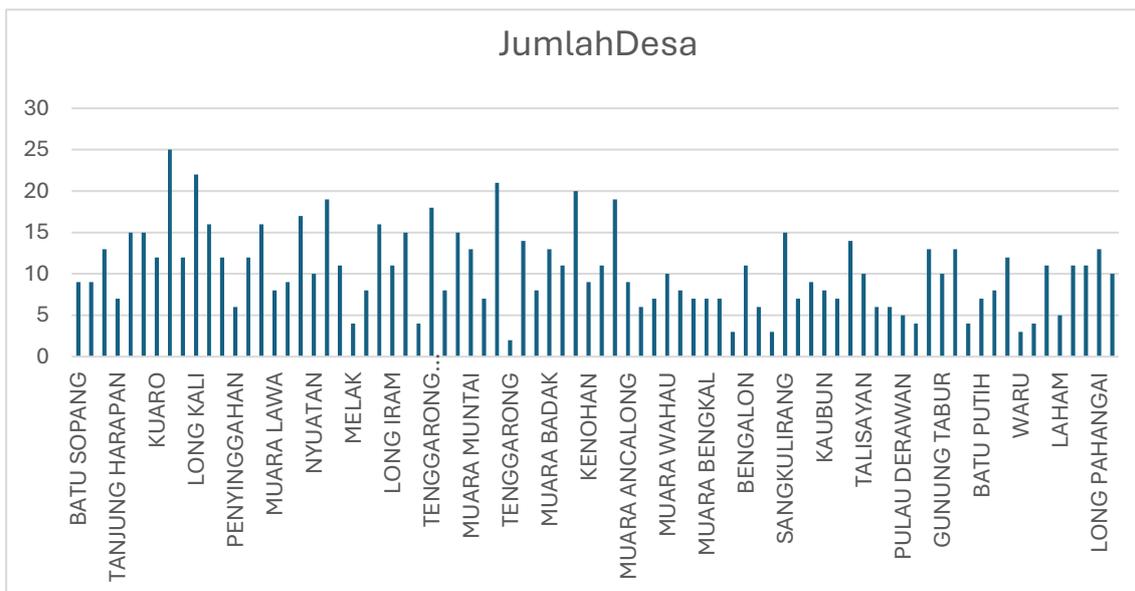
Pembangunan desa dapat diungkit melalui kepemilikan sumber daya wisata yang diukur dari destinasi wisata berbasis alam dan buatan yang tersebar di wilayah desa. Desa wisata adalah wilayah di tingkat pemerintahan terkecil yang memiliki kekhususan dari sisi potensi dan daya tarik wisata, baik dalam bentuk karakter fisik lingkungan alam dan budaya desa (Atmoko, 2021). Kekhususan ini merupakan potensi desa yang patut direncanakan, dikelola, dan dikembangkan untuk pembangunan desa. Pengembangan desa yang memiliki kekhususan perlu didukung dengan adanya pemetaan potensi desa sehingga desa memiliki arah pengembangan yang jelas (Harani, dkk. (2017)). Hal ini juga menjadi penekanan pada studi (Wibowo & Alfarisy, 2020) di mana pengembangan desa menuju desa mandiri memerlukan pemetaan kepemilikan potensi ekonomi desa dari sumber daya desa, khususnya yang potensial sebagai destinasi wisata. Secara lebih spesifik, gambaran umum observasi yang dilakukan sebagai berikut.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Jumlah Desa

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
JumlahDesa	80	10.4	4.81979	2	25

Sumber: Updating Podes 2021, diolah.

Tabel 1 menjelaskan hasil ringkasan statistik jumlah desa untuk tingkat kecamatan yang mengakumulasi jumlah desa masing-masing. Secara umum, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 80 observasi (80 kecamatan), di mana secara rata-rata, per kecamatan memiliki 10 desa, dengan standar deviasi 4,8. Adapun distribusi jumlah desa per kecamatan adalah sebanyak 2 desa (nilai minimal) yang terdapat di Kecamatan Tenggarong dan 25 desa (jumlah tertinggi) yang terdapat di Kecamatan Long Ikis. Secara grafis dapat digambarkan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Persebaran Jumlah Desa per Kecamatan Sampel

Sumber: Updating Podes 2021, diolah.

Studi ini menggunakan jumlah total sampel kecamatan sebanyak 80 kecamatan yang meliputi seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, tidak termasuk Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Berdasarkan Tabel 2. ringkasan statistik dapat ditunjukkan variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian ini. Dimensi pembangunan desa dicerminkan dari nilai indeks pembangunan desa atau IDM2021 yang secara rata-rata dengan 80 kecamatan di Provinsi Kaltim ini memiliki nilai sebesar 0,711 lebih baik dibandingkan rata-rata IDM2021 nasional yang berada di angka 0,637. Dengan rentang IDM yang berada pada rentang 0 sampai dengan 1, nilai ini dapat dikatakan cukup baik.

Masih pada Tabel 4.2., variabel tidak bebas yang menjadi kunci dalam penelitian ini ialah sumberdayawisata yang diukur dari jumlah kepemilikan destinasi wisata alam dan buatan pada tingkat desa di masing-masing kecamatan. Kami mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,5 yang mengartikan bahwa setiap kecamatan memiliki rata-rata 3 sampai 4 destinasi wisata desa di wilayahnya. Kemudian masih terdapat 18 kecamatan yang tidak memiliki sama sekali kepemilikan sumber daya destinasi wisata di sisi lain hanya terdapat dua kecamatan yang memiliki di atas 10 destinasi wisata yaitu pada Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Sangatta Selatan dan Kecamatan Pulau Derawan.

Adapun jumlah pasar pada 80 kecamatan yang menjadi sampel memiliki rata-rata 2,1 atau sebanyak 2 pasar saja, dari angka maksimum yaitu 16 pasar. Ini mengindikasikan adanya ketimpangan infrastruktur ekonomi di tingkat desa di Prov. Kaltim. Sementara kita mengetahui bahwa jumlah pasar mengindikasikan tingkat aktivitas transaksi yang mempengaruhi kegiatan perdagangan pada tingkat desa. Sementara itu, dari aspek jumlah industri mikro kecil juga

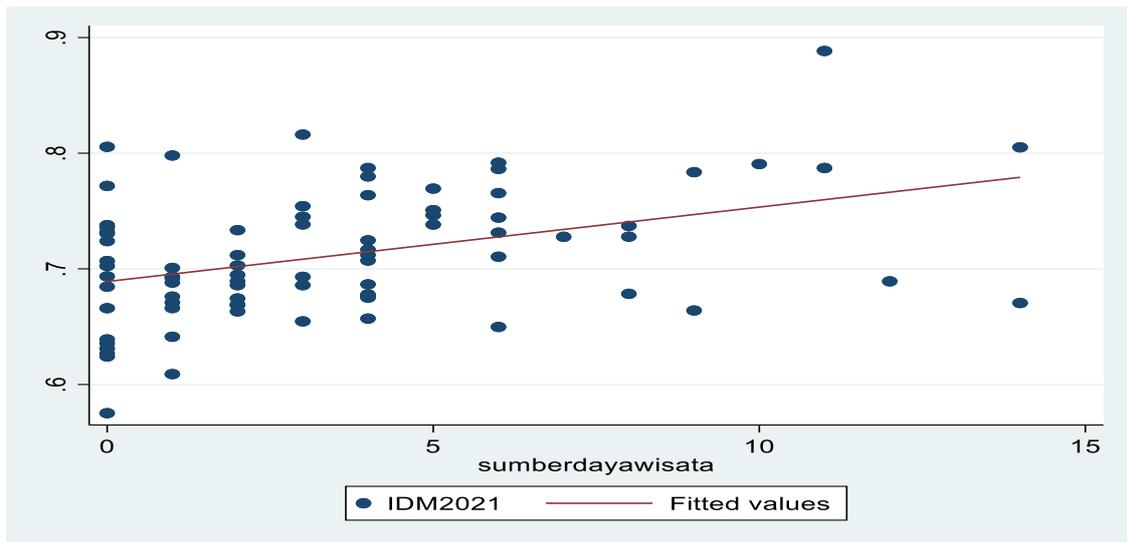
menunjukkan rata-rata jumlah industri sebanyak 73 unit usaha, meskipun masih terdapat kecamatan yang tidak memiliki jumlah industri, di sisi lain juga terdapat kecamatan yang jumlah industrinya mencapai 416 unit usaha. Kami juga menaruh perhatian penting pada aset infrastruktur telekomunikasi yaitu jumlah Base Transceiver Station (BTS) yang merupakan perangkat utama untuk menjalin konektivitas internet. Studi ini menemukan secara rata-rata terdapat 12 BTS dalam tiap kecamatan.

Selanjutnya dalam studi ini juga memasukkan jumlah aparatur tingkat desa sebagai variabel kontrol di mana rata-rata per kecamatan memiliki 42. Lebih lanjut kami juga tertarik untuk memasukkan beberapa variabel kontrol yang kami anggap mampu menjelaskan variasi dari indeks pembangunan desa di Indonesia maupun berpotensi sebagai pemoderasi yaitu pendidikan kepala desa, pendidikan sekretaris desa, dan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Data dalam ringkasan statistik pada Tabel 2., mengindikasikan bahwa pendidikan kepala desa yang telah menamatkan program sekurang-kurangnya diploma rata-ratanya memiliki proporsi 0,24 atau masih sangat kurang ($< 0,50$) dengan skala 0 - 1. Begitu juga rata-rata proporsi pendidikan sekretaris desa yang menamatkan pendidikan sekurang-kurangnya diploma ialah 0,35 atau masih kurang dari setengah (0,5) pada skala 0-1. Ini mencerminkan masih rendahnya pendidikan yang ditamatkan pejabat pemerintahan desa yang diakumulasikan ke tingkat kecamatan dalam studi ini. Sementara itu kami juga memasukkan jumlah BUMDes sebagai variabel prediktor dan moderasi, di mana rata-rata per kecamatan memiliki 12 BUMDes. Walaupun demikian berdasarkan data updating Podes 2020 ini masih terdapat kecamatan yang tidak memiliki unit BUMDes.

Tabel 2. Ringkasan Statistik Variabel

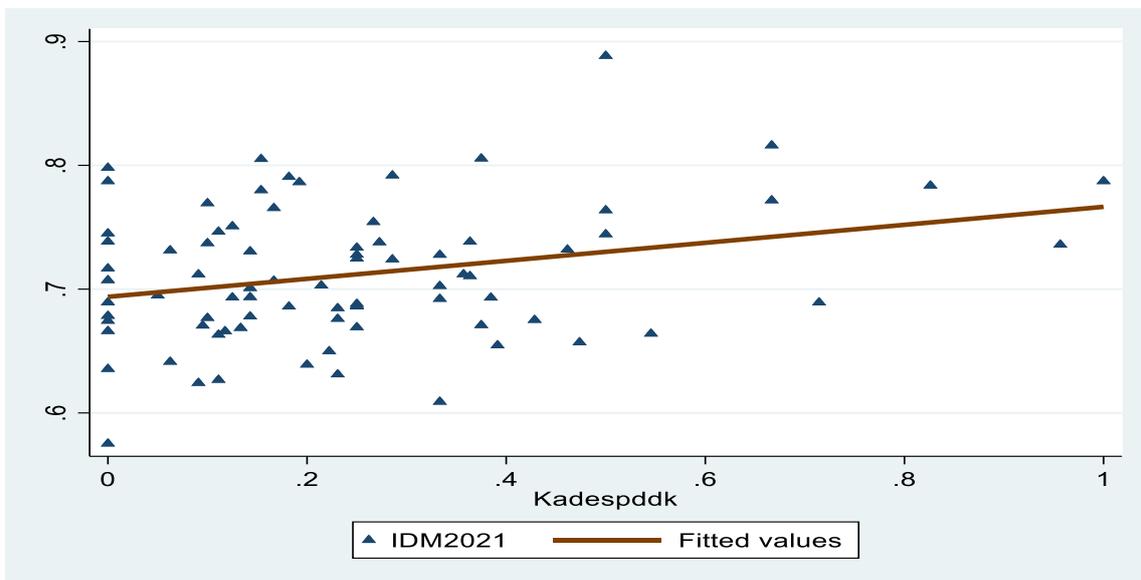
Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
IDM2021	80	0.712	0.055	0.575	0.888
sumberdayawisata	80	3.525	3.457	0	14
jumlahpasar	80	2.125	2.957	0	16
jumlah aparatur	80	42.250	26.557	8	123
jumlah_bts	80	12.188	10.546	1	50
jumlah_industrimikrokecil	80	73.113	88.238	0	416
pendidikan kepala desa	80	0.247	0.217	0	1
pendidikan sekretaris desa	80	0.352	0.238	0	1
jumlahBUMDes	80	12.113	7.559	0	35

Selanjutnya kami juga menyajikan informasi mengenai hubungan korelasional secara ilustratif antar-variabel-variabel yang menjadi perhatian. Gambar 3, misalnya menampilkan korelasi antara hubungan sumber daya wisata (diukur dari jumlah destinasi wisata alam dan buatan) dan indeks pembangunan desa pada tingkat kecamatan pada tahun 2021. Secara visual terdapat indikasi garis *fitted lines* yang positif, mengindikasikan hubungan yang positif antar-variabel tersebut berdasarkan garis yang diprediksi (*fitted lines*), walaupun pencaran dari titik-titik yang ada kurang begitu menunjukkan pola yang tegas.



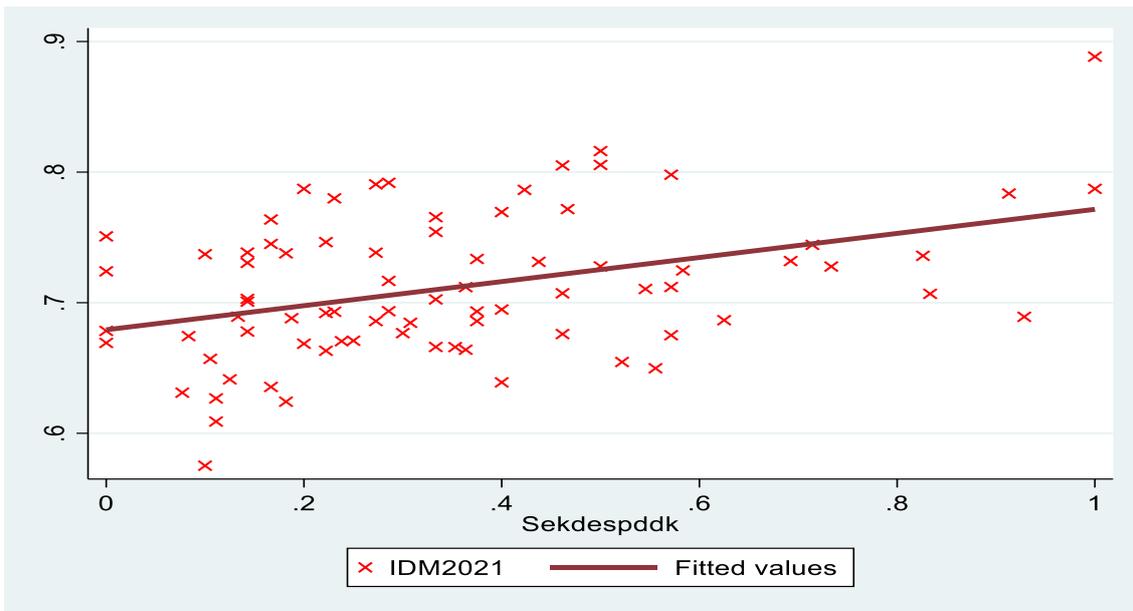
Gambar 3. Hubungan Kepemilikan Sumber Daya Wisata dan Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan di Prov. Kaltim

Pada Gambar 4, disajikan visualisasi korelasi tingkat pendidikan kepala desa secara rata-rata dengan menggunakan data Podes 2020 dan rata-rata indeks desa membangun pada tahun 2021. Sebagaimana hasil yang dilakukan secara parsial, menggunakan rata-rata terdapat kecenderungan prediksi garis linear menjadi positif, meskipun pencarian masih menunjukkan pola yang kurang begitu konkret.



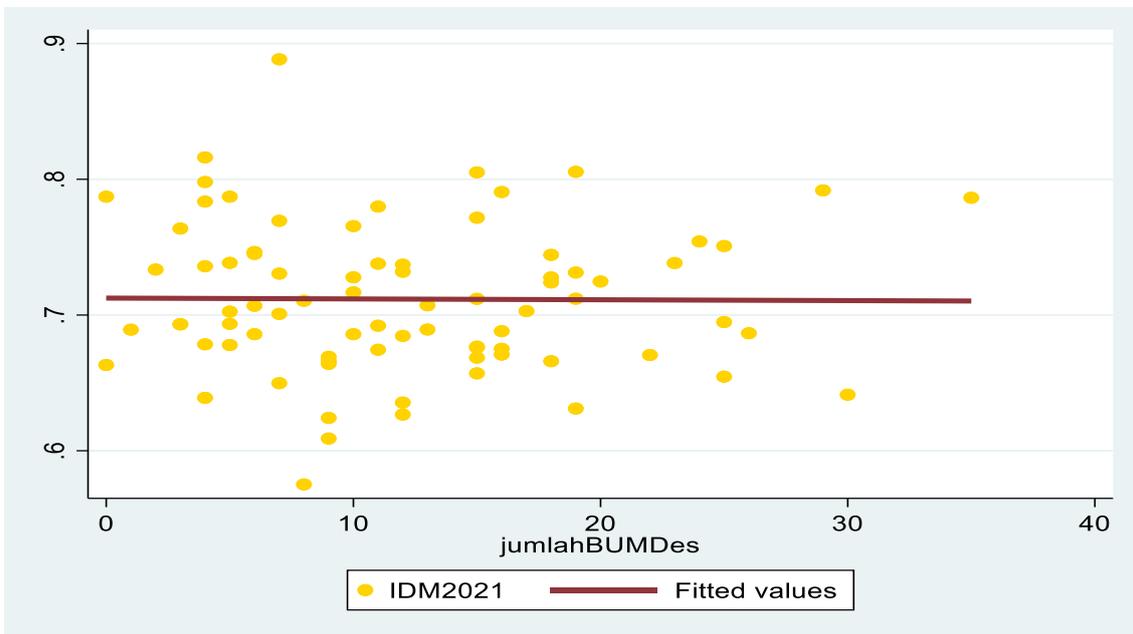
Gambar 4. Korelasi Tingkat Pendidikan Kepala Desa dengan IDM 2021 Tingkat Kecamatan di Provinsi Kaltim

Lebih lanjut pada Gambar 5, disajikan korelasi antara tingkat pendidikan sekretaris desa dan nilai IDM 2021 pada tingkat kecamatan yang juga mengindikasikan adanya korelasi yang positif. Ini menunjukkan adanya kemungkinan hubungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan sekretaris desa, semakin tinggi juga indeks desa membangun. Walaupun demikian hubungan korelasi tidak menunjukkan arah dan besarnya pengaruh dari pendidikan terhadap indeks desa membangun pada tingkat kecamatan.



Gambar 5. Korelasi Tingkat Pendidikan Sekretaris Desa dan IDM di Provinsi Kaltim

Sementara itu terkait dengan hubungan jumlah BUMDes dan indeks desa membangun, Gambar 6, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang lemah yang terprediksi dengan adanya garis linear yang mendatar dan diikuti juga dengan titik-titik pencaran masih belum dapat secara jelas menunjukkan arah polanya. Ini mengindikasikan tidak terdapatnya indikasi hubungan yang bersifat korelasional antara jumlah BUMDes dan IDM ketimpangan produktivitas dan kemandirian fiskal desa yang kemungkinan dipengaruhi oleh apakah desa-desa ini berada di lokasi kabupaten-kabupaten yang tertinggal atau maju.



Gambar 6. Korelasi Jumlah BUMDes dan

3.1. Hasil Analisis Menggunakan Model Regresi OLS (Tanpa Variabel Moderasi)

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil analisis regresi tanpa interaksi dengan menggunakan pendekatan OLS. Pengujian asumsi yang mendasari OLS di antaranya linearitas, normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinieritas sebelumnya telah dilakukan, menyajikan koefisien-koefisien yang terestimasi dari masing-masing variabel independen, di mana sumber daya wisata

merupakan variabel kunci yang menjadi perhatian utama dalam analisis model regresi ini. Adapun variabel-variabel yang lain bertindak sebagai variabel kontrol dan berperan sebagai komparasi dari pengaruh. Pengaruh kepemilikan sumber daya wisata diukur dari jumlah destinasi wisata (baik alam dan buatan) yang dimiliki tiap desa yang kemudian diakumulasikan ke tingkat kecamatan.

Variabel sumberdayawisata menangkap pengaruh ke IDM yang secara konsisten menunjukkan adanya pengaruh dengan arah yang positif baik pada model (1), (2), dan (3) dan secara statistik signifikan (tingkat kepercayaan (*level of confidence*) 5 - 1 %). Misalnya dapat diinterpretasikan pada model (3) [kolom 3], di mana variabel-variabel kontrol lainnya dikendalikan (yaitu jumlah pasar, jumlah aparatur, jumlah BTS, jumlah industri mikro dan kecil), bahwa jika sumber daya wisata (dalam hal ini kepemilikan destinasi wisata alam dan buatan) meningkat satu satuan maka dengan asumsi variabel kontrol lainnya tetap, akan meningkatkan indeks desa membangun pada tingkat kecamatan sebesar 0,004 satuan indeks signifikan pada *alpha* 5%. Ini juga dapat diartikan jika rata-rata IDM tahun 2021 pada tingkat kecamatan adalah sebesar 0,711 maka peningkatan 0,004 menghasilkan peningkatan nilai IDM sebesar 0.715.

Tabel 3. Pengaruh Kepemilikan Sumber Daya Wisata terhadap Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur

Variabel	(1) model1	(2) model2	(3) model3
sumberdayawisata	0.006*** (0.002)	0.007*** (0.002)	0.004** (0.002)
jumlahpasar		0.003 (0.002)	0.003* (0.002)
jumlah_aparatur		-0.000* (0.000)	-0.001*** (0.000)
jumlah_bts			0.003*** (0.001)
jumlah_indusmikro			0.000 (0.000)
Constant	0.689*** (0.009)	0.700*** (0.012)	0.699*** (0.012)
Observations	80	80	80
R-squared	0.164	0.203	0.425

Variabel dependen: IDM2021

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Masih pada Tabel 3, pengaruh jumlah pasar juga menunjukkan dampak positif terhadap Indeks Pembangunan Desa di tingkat kecamatan dengan besaran koefisien adalah 0,003, walaupun secara statistik hanya signifikan pada tingkat kepercayaan 10%. Sementara itu, sesuai prediksi semakin banyak jumlah infrastruktur telekomunikasi (diukur dari jumlah *Base Transceiver Station* yang berfungsi memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator) dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Desa hingga 0.003 indeks poin signifikan pada alpha 1 persen, dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. Hal yang juga menarik ditemukan dalam studi ini ialah ketidaksignifikan dari pengaruh variabel jumlah industri mikro dan kecil meskipun arah pengaruh menunjukkan kesesuaian. Hal yang juga menarik ialah adanya pengaruh negatif dan signifikan dari jumlah aparatur terhadap indeks desa membangun di tingkat kecamatan. Dapat dimaknai dalam hasil regresi ini bahwa ketika jumlah aparatur meningkat satu satuan (dalam orang) akan menurunkan indeks desa membangun sebesar 0,001 satuan poin indeks. Ini menunjukkan semakin banyak aparatur justru menjadi kontraproduktif dalam peningkatan kualitas pembangunan desa. Ini juga mensinyalkan bahwa efektivitas dan efisiensi jumlah pegawai, dan kualitas sumber daya manusia aparatur, di tingkat pemerintahan desa, lebih menentukan kualitas pembangunan desa dibandingkan dari segi kuantitasnya.

Pada Tabel 4. kami menyajikan hasil estimasi untuk mengetahui kembali pengaruh kepemilikan sumber daya wisata terhadap indeks desa membangun tingkat kecamatan dengan penambahan variabel kontrol yaitu tingkat pendidikan kepala desa, tingkat pendidikan sekretaris desa dan jumlah BUMDes. Tampak misalnya, walaupun terdapat penambahan variabel kontrol tersebut, pengaruh sumber daya wisata (pada model (1)-(4)) masih konsisten mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik pada α 5%. Pada seluruh model juga menunjukkan bahwa untuk variabel independen lainnya arah pengaruh konsisten dengan hasil regresi model sebelumnya, meskipun hanya dua variabel yaitu jumlah BTS yang memiliki pengaruh signifikan secara statistik pada α 1%, dan juga jumlah aparatur secara konsisten pada semua model ((1)-(4)) memiliki koefisien yang negatif dan signifikan pada α 1 persen yang berarti bahwa peningkatan jumlah aparatur potensial menurunkan indeks pembangunan desa pada tingkat kecamatan. Hasil ini tidaklah mengejutkan karena pembangunan desa tidaklah selalu bergantung dari banyaknya aparatur pemerintah melainkan kemampuan aparatur dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, serta menyusun perencanaan dan program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Satu hal baru yang didapatkan dalam analisis regresi ini, sebagaimana yang ditampilkan ringkasannya dalam Tabel 4 adalah pengaruh tingkat pendidikan kepala desa dan sekretaris desa terhadap indeks pembangunan desa tingkat kecamatan. Secara parsial, model (1) menunjukkan pengaruh tingkat pendidikan kepala desa (proporsi yang menamatkan pendidikan paling rendah diploma) memiliki pengaruh positif namun secara statistik tidak signifikan. Kekuatan pengaruh cukup besar yaitu dengan koefisien 0,027, jauh lebih besar dari pengaruh sumber daya wisata yang berkisar 0.003-0.004 indeks poin, namun secara rata-rata hanya 0,27 atau 27 persen saja kepala desa yang tingkat pendidikannya menyelesaikan paling rendah diploma, maka kemungkinan pengaruhnya menjadi tidak signifikan ketika diperluas ke tingkat populasi.

Pada model (2) juga ditunjukkan pengaruh tingkat pendidikan sekretaris desa (proporsi yang menamatkan pendidikan paling rendah diploma) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik. Kekuatan pengaruh cukup besar yaitu dengan koefisien 0,028, jauh lebih besar dari pengaruh sumber daya wisata, namun karena secara rata-rata hanya 0,35 atau 35 persen saja tingkat pendidikan sekretaris desa yang menyelesaikan diploma, maka sama halnya dengan tingkat pendidikan kepala desa, kemungkinan pengaruhnya menjadi tidak signifikan ketika diperluas ke tingkat populasi.

Tabel 4. Pengaruh Kepemilikan Sumber Daya Wisata terhadap Indeks Desa Membangun dengan tambahan variabel kontrol tingkat pendidikan aparatur desa dan jumlah BUMDes

Variables	(1) model1	(2) model2	(3) model3	(4) model4
sumberdayawisata	0.004** (0.002)	0.004** (0.002)	0.004** (0.002)	0.004** (0.002)
jumlahpasar	0.003* (0.002)	0.003* (0.002)	0.003 (0.002)	0.003 (0.002)
jumlah_aparatur	-0.001*** (0.000)	-0.001*** (0.000)	-0.001*** (0.000)	-0.001*** (0.000)
jumlah_bts	0.003*** (0.001)	0.003*** (0.001)	0.003*** (0.001)	0.002*** (0.001)
jumlah_indusmikro	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)
Kadespddk	0.027 (0.028)			0.022 (0.035)
Sekdespddk		0.028 (0.025)		0.024 (0.031)
jumlahBUMDes			0.000 (0.001)	0.001 (0.001)
Constant	0.695***	0.694***	0.696***	0.686***

Variables	(1) model1	(2) model2	(3) model3	(4) model4
	(0.013)	(0.013)	(0.012)	(0.014)
Observations	80	80	80	80
R-squared	0.433	0.434	0.427	0.443

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Terakhir yaitu pada model (3) variabel Jumlah BUMDes juga memiliki arah tanda yang positif, namun secara statistik tidak signifikan. Hal ini cukup mengejutkan karena secara rata-rata (jika kita mengacu ke ringkasan statistik sebelumnya), jumlah BUMDes per kecamatan sebanyak 12, lebih tinggi dibandingkan jumlah desa secara rata-rata per kecamatan adalah sebanyak 10 desa. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan BUMDes, meskipun secara legalitas dan jumlah mencukupi, namun kegiatan yang dihasilkan kemungkinan belum mampu secara optimal membawa dampak ke aspek pembangunan desa, jika mengacu ke indeks IDM2021.

Kemudian pada model (4) kami menggunakan seluruh variabel kontrol termasuk tingkat pendidikan kepala desa, sekretaris desa, dan jumlah BUMDes secara bersama-sama, dan hasil menunjukkan bahwa ketiga variabel ini tidak signifikan pengaruhnya ke indeks desa membangun pada tingkat kecamatan. Secara umum model (4) memiliki koefisien determinasi lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya, sehingga dapat kami interpretasikan bahwa model (4) menjadi model yang dipilih dalam studi ini jika menggunakan regresi tanpa variabel moderasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa desa-desa yang terletak di luar pulau Jawa masih memiliki problematika khas yaitu kualitas dan ketersediaan sarana prasarana desa yang kurang maksimal. Ini menyebabkan pengaruh jumlah pasar, meskipun positif atau sesuai dengan arah pengaruh yang diprediksi, menjadi tidak signifikan pada model (3) dan (4), ketika seluruh variabel kontrol dimasukkan dalam model.

Tabel 5. Rekapitulasi Hubungan Parsial Variabel Sumber Daya Wisata, Tingkat Pendidikan Kepala Desa, Tingkat Pendidikan Sekretaris Desa, dan Jumlah BUMDes

Pengaruh	Arah koefisien	Signifikansi	Keterangan
Sumber Daya Wisata ==> Indeks Desa Membangun	Positif (+)	Signifikan	Mendukung hipotesis
Tingkat Pendidikan Kepala Desa ==> Indeks Desa Membangun	Positif (+)	Tidak Signifikan	Arah parameter sesuai hipotesis
Tingkat Pendidikan Kepala Desa ==> Indeks Desa Membangun	Positif (+)	Tidak Signifikan	Arah parameter sesuai hipotesis
Jumlah BUMDes ==> Indeks Desa Membangun	Positif (+)	Tidak Signifikan	Arah parameter sesuai hipotesis

3.2. Hasil Analisis Regresi Menggunakan Variabel Moderasi

Jika pada tabel sebelumnya memfokuskan pada pertanyaan apakah sumber daya wisata “mempengaruhi” pembangunan desa pada tingkat kecamatan yang diukur dari indeks desa membangun di tingkat kecamatan, pada bagian ini kami juga tertarik untuk melakukan analisis apakah pengaruh sumber daya wisata ke pembangunan desa di tingkat kecamatan ini dimoderasi (diperkuat atau diperlemah) oleh variabel tingkat pendidikan kepala desa, sekretaris desa, dan jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan.

Tabel 6. Hasil Regresi dengan Variabel Moderasi

Variables	(1) model1	(2) model2	(3) model3
sumberdayawisata	0.008*** (0.002)	0.007** (0.003)	0.002 (0.004)
jumlahpasar	0.003* (0.002)	0.003 (0.002)	0.002 (0.002)
jumlah_aparatur	-0.001*** (0.000)	-0.001*** (0.000)	-0.001*** (0.000)
jumlah_bts	0.003*** (0.001)	0.003*** (0.001)	0.003*** (0.001)
jumlah_indusmikro	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)
Kadespddk	0.078* (0.046)		
<i>Sdwisata_kadespddk</i>	-0.014* (0.008)		
Sekdespddk		0.058 (0.037)	
<i>sdwisata_sekdespddk</i>		-0.007 (0.007)	
jumlahBUMDes			-0.000 (0.001)
<i>sdwisata_bumdes</i>			0.000 (0.000)
Constant	0.682*** (0.015)	0.682*** (0.016)	0.703*** (0.017)
Observations	80	80	80
R-squared	0.473	0.448	0.432

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Pengujian asumsi yang mendasari OLS di antaranya linearitas, normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas telah juga dilakukan dan hasilnya ditampilkan dalam Lampiran 2. Tabel menyajikan hasil analisis di mana terdapat variabel interaksi antara sumber daya wisata dan tingkat pendidikan kepala desa (Model1), antara sumber daya wisata dan tingkat pendidikan sekretaris desa (Model2), dan sumber daya wisata dan jumlah BUMDes (Model3). Hasil analisis dengan variabel moderasi pada model (1) menunjukkan bahwa pengaruh sumber daya wisata terhadap indeks pembangunan desa di tingkat kecamatan yang dimoderasi oleh tingkat pendidikan kepala desa adalah negatif dan tidak signifikan pada alpha 5%. Ini mengartikan bahwa pengaruh positif dari kepemilikan sumber daya wisata ke pembangunan desa akan diperlemah ketika tingkat pendidikan kepala desa adalah Diploma ke atas. Ini memang cukup kontrarelevansi dengan studi empiris yang ada, namun karena pengaruhnya secara statistik tidak signifikan maka hasil ini tidak dapat dibuktikan.

Hasil analisis dengan variabel moderasi pada model (2) menunjukkan bahwa pengaruh sumber daya wisata terhadap indeks pembangunan desa di tingkat kecamatan yang dimoderasi oleh tingkat pendidikan sekretaris desa juga negatif dan tidak signifikan pada level kepercayaan berapapun. Dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh positif dari kepemilikan sumber daya wisata ke pembangunan desa menjadi diperlemah dari adanya efek tingkat pendidikan sekretaris desa dengan pendidikan Diploma ke atas. Namun karena pengaruhnya secara statistik tidak signifikan maka hasil ini tidak dapat dibuktikan.

Hasil analisis dengan variabel moderasi pada model (4) menunjukkan bahwa pengaruh sumber daya wisata terhadap indeks pembangunan desa di tingkat kecamatan yang dimoderasi oleh Jumlah BUMDes adalah negatif dan tidak signifikan pada alpha 5%. Ini mengartikan bahwa pengaruh positif dari kepemilikan sumber daya wisata ke pembangunan desa akan diperlemah ketika tingkat

pendidikan kepala desa adalah Diploma ke atas. Ini memang cukup kontrarelevansi dengan studi empiris yang ada, namun karena pengaruhnya secara statistik tidak signifikan maka hasil ini tidak dapat dibuktikan.

4. Simpulan

Penelitian mengidentifikasi beberapa temuan: *Pertama*, dengan menggunakan analisis regresi OLS, terdapat bukti adanya pengaruh positif dan signifikan dari kepemilikan sumber daya wisata terhadap indeks desa membangun pada tahun 2021. Pengaruh ini konsisten dengan mengendalikan beberapa variabel kontrol, termasuk dalam hal ini tingkat pendidikan kepala desa, tingkat pendidikan sekretaris desa dan jumlah BUMDes.

Kedua, tingkat pendidikan kepala desa dan sekretaris desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap indeks desa membangun pada tingkat kecamatan. Jumlah BUMDes juga berpengaruh positif namun tidak signifikan dalam studi ini.

Ketiga, kami juga melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan variabel moderasi, di mana baik menggunakan tingkat pendidikan kepala desa dan sekretaris desa, maupun jumlah BUMDes, kesemua variabel ini tidak terbukti secara statistik menjadi variabel yang memoderasi pengaruh kepemilikan sumber daya wisata terhadap indeks desa membangun di tingkat kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur. Ketidaksignifikan ini bisa disebabkan rendahnya proporsi kepala desa dan sekretaris desa yang menamatkan pendidikan sekurang-kurangnya diploma, sehingga kurang berpengaruh signifikan secara langsung terhadap indeks desa membangun maupun sebagai variabel yang memoderasi.

Daftar Pustaka

- T. P. H. Atmoko, "Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman," *Media Wisata*, vol. 12, no. 2, Sep. 2021, doi: 10.36276/mws.v12i2.209.
- A. R. Harani, F. Arifan, H. Werdiningsih, and R. Riskiyanto, "PEMETAAN POTENSI DESA MENUJU DESA WISATA YANG BERKARAKTER (Study kasus: Desa Pesantren Kec Ulujami Kab Pemalang)," *MODUL*, vol. 17, no. 1, p. 42, Sep. 2017, doi: 10.14710/mdl.17.1.2017.42-47.
- A. A. Wibowo and M. F. Alfarisy, "ANALISIS POTENSI EKONOMI DESA DAN PROSPEK PENGEMBANGANNYA," *J. Ekon. Bisnis Dan Akunt.*, vol. 22, no. 2, pp. 204-216, Jun. 2020, doi: 10.32424/jeba.v22i2.1596.
- "Lalu Moh. Nazar Fajri, SE., MPA," vol. 1, p. 12, 2017.
- I. F. Ulfah, A. Setiawan, and A. Rahmawati, "Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur," *Polit. Indones. Indones. Polit. Sci. Rev.*, vol. 2, no. 1, p. 46, Jan. 2017, doi: 10.15294/jpi.v2i1.8486.
- R. C. R. Kusmayadi and A. Fauzi, "PENGARUH KEBERADAAN DESA WISATA TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT," p. 15.
- D. C. Larasati and Y. Kurrahman, "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA WISATA HUTAN PINUS UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA BENDOSARI, KECAMATAN PUJON, KABUPATEN MALANG," *REFORMASI*, vol. 9, no. 2, p. 161, Oct. 2019, doi: 10.33366/rfr.v9i2.1509.
- Y. P. Wicaksono, I. Surya, and E. Iskandar, "PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) AMANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA PADANG JAYA KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER," *EJournal Ilmu Pemerintah.*, vol. 5, p. 14, 2014.
- S. Sembiring, "KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA," *Kertha Patrika*, vol. 39, no. 01, p. 16, Aug. 2017, doi: 10.24843/KP.2017.v39.i01.p02.
- A. Prawitno, "ANALISIS PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KABUPATEN GOWA," *Krit. J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, vol. 5, p. 11, 2019.
- N. K. Sinarwati, I. N. P. Yasa, and I. M. P. A. Putra, "Does Indonesian Government Program Have an Impact on the Development of Village-Owned Enterprise?," presented at the 5th International Conference on

- Tourism, Economics, Accounting, Management and Social Science (TEAMS 2020), Singaraja, Indonesia, 2020. doi: 10.2991/aebmr.k.201212.005.
- Kurniawan and I. Firmansyah, "Development of Village Owned Enterprises (BUMDES) as a Solution to Achieve Mandiri Village," *Int. J. Bus. Econ. Aff.*, vol. 3, no. 5, Oct. 2018, doi: 10.24088/IJBEA-2018-35001.
- I. M. Sara, K. A. K. Saputra, and A. A. K. Jayawarsa, "Profesionalisme Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan," no. 2, p. 9, 2019.
- B. Arifin *et al.*, "Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia," *J. Rural Stud.*, vol. 79, pp. 382-394, Oct. 2020, doi: 10.1016/j.jrurstud.2020.08.052.
- I. T. Puri and K. Khoirunurrofik, "The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDES) for The Village Community Economy," *Econ. Dev. Anal. J.*, vol. 10, no. 1, pp. 12-21, Feb. 2021, doi: 10.15294/edaj.v10i1.40823.
- Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105-117.
- Suryaningsih, O., & Nugraha, J. T. (2018). Peran Lembaga Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Wanurejo dan Dampaknya terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 02(01), 120-128.
- Murodah, M., Charolina, O., & Marisidi, M. (2022). Implikasi Pengembangan Potensi Desa Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Lagan Bungin Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Era Pandemi Covid-19. *Journal of Science and Social Research*, 5(2), 398. <https://doi.org/10.54314/jssr.v5i2.943>
- Kartika, T. (2016). Impact of Tourism Development on Economic, Socio-Cultural and Physical Environment Aspects in Panjalu Village. *Jhdp*, 3(1), 1-113.
- Wibowo, T. A., Kaskoyo, H., & Damai, A. A. (2019). Pengembangan Wisata Pantai Mutun Terhadap Dampak Fisik, Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran, Lampung. *Jurnal Pengembangan Kota*, 7(1), 83. <https://doi.org/10.14710/jpk.7.1.83-90>
- Made Bayan Ni Luh, S., Lusi, P., & Surya, S. (2021). Dampak Pengembangan Obyek Wisata Kayu Putih Terhadap Keuangan Dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Di Banjar Bayan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 12(3), 980-987. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/40699>
- Utari, A. M., & Ati, N. U. (2022). KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Wisata Lembah Indah Dusun Gendogo Desa Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang) *Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Malang , Jl . MT Haryono 193 Malang , 65144 , Indonesia Pendahuluan*. 16(7), 11-20.
- Dani Saputra. (2021). Pengaruh Kawasan Pengembangan Ekowisata Bukit Rimbang Baling Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. *Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, Dan Komputer*, 4(1), 658-668. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13592>
- Handayani, E., & Harlina, T. (2021). Pengaruh Wisata Desa Adat Osing Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Masyarakat Kemiren Banyuwangi. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 17(2), 294-307. <https://doi.org/10.31967/relasi.v17i2.488>
- Mutya, A. (2020). *Journal of Urban Planning Studies Pengaruh Kegiatan Pariwisata Rammang-Rammang terhadap Peningkatan*. 01(01), 80-87